

PENGARUH SEKTOR EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI RIAU

Riadi Armas & Dian Alfira Kasmita

Pendidikan Ekonomi Universitas Riau

ABSTRAK

Salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB memperlihatkan besarnya produksi yang telah diciptakan oleh masing-masing sektor ekonomi pada tahun tertentu. Semakin tinggi PDRB yang dihasilkan pada masing – masing sektor, maka akan semakin besar pula kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sektor ekonomi (migas dan non migas) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau dari tahun 1990 hingga 2011. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data PDRB sektor ekonomi dan laporan realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Riau yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi tanpa migas berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau, meskipun tidak setinggi pada pertumbuhan ekonomi migas. Terutama dari sektor pertambangan, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan sektor jasa –jasa. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sektor ekonomi migas berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau, terutama pada sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

Kata kunci :Sektor ekonomi, pendapatan asli daerah.

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia No 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dengan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah. Hal ini dipertegas dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pusat dan daerah, maka daerah kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang cukup luas dalam membuat perencanaan pembangunan diwilayahnya masing-masing. Kewenangan ini mencakup perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan pembangunan wilayah dan pemanfaatan secara optimal potensi wilayah.

Untuk keberhasilan pembangunan daerah perlu didukung kekuatan dana yang dimiliki daerah, oleh sebab itu pemerintah wajib mengusahakan ketersediaan dana yang dibutuhkan dengan berbagai upaya. Salah satu upaya adalah mendorong perkembangan perekonomian.

Salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB memperlihatkan besarnya produksi yang telah diciptakan oleh masing-masing sektor ekonomi pada tahun tertentu. Selain itu, dengan memperhitungkan pertumbuhan serta kontribusi masing-masing subsektor dalam PDRB, dapat dilihat masing-masing subsektor terhadap perekonomian daerah tersebut.

Dari berbagai variabel ekonomi makro, *Gross Domestic Product* atau Produk Domestik Bruto merupakan variabel ekonomi yang menempati posisi terpenting, sebagaimana diketahui *Gross Domestic Bruto* mengukur output barang dan jasa dari suatu negara dan pendapatan dari negara tersebut. Perhitungan pendapatan nasional ini merupakan ukuran makro yang paling utama tentang kondisi suatu negara (Sadono Sukirno, 2010).

Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang-barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dan dalam jangka waktu tertentu atas dasar harga pasar, selanjutnya Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disajikan dalam dua bentuk yaitu atas dasar harga konstan dan harga berlaku (BPS Provinsi Riau, 2011).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tinggi merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Kemajuan ekonomi suatu bangsa diukur dengan laju pertumbuhan pendapatan nasional, yang umumnya digunakan konsep PDB untuk nasional dan PDRB bagi daerah.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Suparmoko, 2002). Dengan demikian otonomi daerah yang diberikan kepada daerah kabupaten atau kota diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat yang hidup di masing-masing daerah. Dalam hal ini kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah, berkembangnya suatu subsektor dalam PDRB berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga diharapkan dapat pula meningkatkan penerimaan PAD.

Hubungan keuangan dan daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan fungsinya dengan efektif. Untuk melaksanakan fungsi tersebut harus ada dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah (Ahmad Yani, 2004).

Sumber pendapatan daerah menurut UU No 22 tahun 1999 tentang penerimaan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan asli daerah
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain- lain pendapatan daerah yang sah

Menurut UU No 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada ketersediaan potensi ekonomi dan pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Hal ini terkait dengan kewajibannya untuk menentukan sektor-sektor yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah tumbuh dengan cepat selain itu juga untuk menentukan apa tindak lanjut untuk menanggulangi sektor yang lemah. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang pengaruh semua sektor tersebut baik yang dominan maupun yang tidak dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi dalam membangun ekonomi Provinsi Riau, sehingga pemerintah dapat memperoleh informasi yang riil mengenai peranan sektor-sektor tersebut dalam perekonomian.

KAJIAN PUSTAKA

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur keberhasilan proses pembangunan.

Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang-barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dan dalam jangka waktu tertentu atas dasar harga pasar, selanjutnya Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disajikan dalam dua bentuk yaitu atas dasar harga konstan dan harga berlaku (BPS Provinsi Riau, 2011).

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar (Benfrizs, 2012).

Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam negara dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk warga negara tersebut dan perusahaan negara lain (Sadono Sukirno, 2010).

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam sebuah negeri pada satu periode (Mankiw, 2006). Dari berbagai variabel ekonomi makro, Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto merupakan variabel ekonomi yang menempati posisi terpenting, sebagaimana diketahui Gross Domestic Bruto mengukur output barang dan jasa dari suatu negara dan pendapatan dari negara tersebut. Perhitungan pendapatan nasional ini merupakan ukuran makro yang paling utama tentang kondisi suatu negara (Sadono Sukirno, 2010).

Cara perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilakukan dengan tiga pendekatan (Ardy, 2009) yaitu : 1) pendekatan produksi, 2) pendekatan pengeluaran, 3) pendekatan pendapatan.

Sektor Pertanian

Subsektor Tanaman Bahan Makanan

Meliputi semua kegiatan perekonomian yang menghasilkan komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela rambat, ketela pohon, umbi-umbian, kacang tanah, kacang kedelai, kacang-kacangan lainnya, sayur-sayuran, buah-buahan serta tanaman bahan makanan lainnya (BPS Provinsi Riau, 2011).

Subsektor Perkebunan

Meliputi semua jenis kegiatan tanaman perkebunan baik yang diusahakan rakyat maupun perusahaan perkebunan. Adapun komoditi yang dihasilkan seperti :

cengkeh, jahe, jambu mete, jarak, kakau, karet, kapas, kapok, kayu manis, kelapa, kelapa sawit, kina, kopi, lada, pala, tebu, serta tanaman perkebunan lainnya (BPS Provinsi Riau, 2011).

Subsektor Peternakan

Meliputi semua kegiatan pembibitan dan budidaya segala jenis ternak dengan tujuan untuk dikembangkan, dibesarkan, dipotong dan diambil hasil-hasilnya, baik yang dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Komoditi hasil peternakan antara lain : sapi, kerbau, kambing, babi, ayam, telur itik, serta hewan peliharaan lainnya (BPS Provinsi Riau, 2011).

Subsektor Kehutanan

Meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan dan akar-akaran. Termasuk juga kegiatan perburuan. Komoditi hasil kehutanan diantaranya adalah kayu gelondongan, kayu bakar, rotan, arang, bamboo, kopal, menjangan, babi hutan, serta hasil hutan lainnya (BPS Provinsi Riau, 2011).

Subsektor Perikanan

Meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar maupun di air asin. Komoditi perikanan antara lain seperti ikan tuna dan jenis ikan laut lainnya, ikan mas dan ikan-ikan darat lainnya, ikan bandeng dan jenis ikan-ikan air payau lainnya, udang dan binatang berkulit keras lainnya, cumi-cumi dan binatang lunak lainnya (BPS Provinsi Riau, 2011).

Sektor Pertambangan dan Penggalian

Subsektor Pertambangan

Meliputi kegiatan penambangan bauksit, timah, granit, dan sebagainya (BPS Provinsi Riau, 2011).

Subsektor Penggalian

Meliputi penggalian batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat dan sebagainya (BPS Provinsi Riau, 2011).

Sektor Industri Pengolahan

Kegiatan sektor industri pengolahan hanya mencakup industri non migas, yaitu: 1) Industri besar / sedang, dan 2) Industri kecil dan kerajinan rumah tangga (BPS Provinsi Riau, 2011).

Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum

Subsektor Listrik

Kegiatan ini mencakup pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik, baik yang diselenggarakan oleh perusahaan listrik Negara (PLN) maupun oleh non PLN (BPS Provinsi Riau, 2011).

Subsektor Air Bersih

Kegiatan ini meliputi kegiatan penjernihan dan pendistribusian air bersih oleh PAM maupun bukan PAM (BPS Provinsi Riau, 2011).

Sektor Bangunan

Sektor bangunan terbagi 5 bagian yaitu : bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal, prasarana pertanian, jalan-jembatan-pelabuhan, bangunan instalasi listrik-gas-air minum dan komunikasi serta bangunan lainnya (BPS Provinsi Riau, 2011).

Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Subsektor Perdagangan

Kegiatan yang dicakup dalam subsektor perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang, baik barang baru maupun bekas, untuk tujuan penyaluran/ pendistribusian tanpa merubah sifat barang tersebut. Dalam perhitungannya dikelompokkan kedalam dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar mencakup kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas dari pedagang oleh produsen atau importir ke pedagang besar lainnya, pedagang eceran, perusahaan dan lembaga yang tidak mencari untung. Sedangkan perdagangan eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga tanpa merubah sifat, baik barang baru atau barang bekas (BPS Provinsi Riau, 2011).

Subsektor Hotel

Subsektor ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Yang dimaksud akomodasi disini adalah hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel dan sebagainya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap dimana kegiatan-kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan yang datanya sulit dipisahkan (BPS Provinsi Riau, 2011).

Subsektor Restoran

Kegiatan subsektor restoran mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam subsektor ini seperti rumah makan, warung sate, warung kopi, catering dan kantin (BPS Provinsi Riau, 2011).

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Subsektor Pengangkutan

Kegiatan yang dicakup dalam subsektor pengangkutan terdiri atas jasa angkutan jalan raya, laut udara, dan jasa penunjang angkutan. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti terminal, pelabuhan, dan pergudangan (BPS Provinsi Riau, 2011).

Subsektor Komunikasi

Subsektor ini terdiri dari kegiatan pos dan giro, telekomunikasi, dan jasa penunjang komunikasi. Pos dan giro mencakup kegiatan pemberian jasa pada pihak lain dalam hal pengiriman surat, wesel dan paket pos yang diusahakan oleh Perum pos dan giro. Telekomunikasi meliputi kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman berita melalui telegram, telepon, dan telex yang diusahakan oleh PT. Telekomunikasi dan PT. Indosat. Jasa penunjang komunikasi meliputi kegiatan lainnya yang menunjang kegiatan komunikasi seperti wartel, warnet, dan telepon seluler (BPS Provinsi Riau, 2011).

Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan

Subsektor Bank, meliputi Bank Indonesia (BI) dan Bank non BI (Bank umum pemerintah dan swasta) dan BPR. Subsektor lembaga keuangan bukan Bank mencakup kegiatan asuransi (asuransi jiwa, asuransi sosial, asuransi kerugian dan asuransi lainnya), mencakup juga koperasi (KUD dan non KUD), pegadaian dan

dana pensiun. Kemudian subsektor jasa penunjang keuangan mencakup pedagang valuta asing (valas), pasar modal dan sebagainya (BPS Provinsi Riau, 2011).

Sektor Jasa - Jasa

Subsektor jasa sosial dan kemasyarakatan mencakup jasa pendidikan (sekolah swasta) meliputi TK, SD, SLTP, SLTA dan Universitas/Akademi. Juga termasuk jasa pendidikan keterampilan berbentuk kursus. Jasa kesehatan oleh swasta seperti: rumah sakit, rumah bersalin, dokter dan sebagainya. Kemudian jasa kemasyarakatan lainnya seperti panti asuhan dan panti jompo (BPS Provinsi Riau, 2011). Subsektor jasa hiburan mencakup kegiatan bioskop, panggung kesenian, radio swasta, taman hiburan, dan sebagainya (BPS Provinsi Riau, 2011).

Subsektor jasa perorangan dan rumah tangga mencakup kegiatan perbengkelan seperti mobil, motor, sepeda, alat-alat elektronik, dan jasa perorangan seperti salon, tukang semir, tukang jahit, dan sebagainya (BPS Provinsi Riau, 2011).

Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan daerah menurut UU No 22 tahun 1999 tentang penerimaan daerah terdiri dari : 1) Pendapatan asli daerah, 2) Dana perimbangan, 3) Pinjaman daerah, dan 4) Lain- lain pendapatan daerah yang sah

Menurut UU No 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah menurut UU No 33 tahun 2004 adalah: 1) hasil pajak daerah, 2) hasil retribusi daerah, 3) hasil laba BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya, dan 4) lain- Lain pendapatan daerah yang dianggap sah.

Salah satu fenomena yang paling mencolok dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dengan pembangunan adalah ketergantungan Pemda yang tinggi terhadap pemerintah pusat dalam hal keuangan. Pembangunan fisik di daerah memang cukup pesat tetapi tingkat ketergantungan fiscal antar daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiscal terlihat dari relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer dari pusat. Walaupun UU telah menggaris bawahi titik berat otonomi pada kab/kota, namun kab/kota yang mengalami tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibanding propinsi.

Rendahnya PAD disebabkan oleh (Mudrajat Kuncoro, 2006) : 1) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah, 2) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, 3) walaupun pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan, 3) bersifat politik yakni adanya kekhawtiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disentrigrasi dan separatisme, 4) kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Peningkatan PAD dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut (Soekarwo, 2003): 1) intensifikasi, dan 2) penggalan sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi), 3) peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Semakin besar kapabilitas suatu daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan maka akan semakin besar pula kemampuan daerah mengurus rumah tangganya sendiri. Khususnya dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Sebaliknya besarnya ketergantungan daerah terhadap pendanaan yang diberikan pemerintah pusat atau kecilnya sumber PAD yang dipungut, akan membatasi ruang gerak dan kemampuan daerah itu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Artinya kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah belum sesuai dengan sasaran (Syapsan, 2006).

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemda lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi (Adi, 2006).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan bahwa besar kecilnya PAD atau tinggi rendahnya PAD dipengaruhi oleh PDRB, karena semakin maju perekonomian ditunjukkan oleh semakin meningkatnya PDRB dan pendapatan perkapita penduduknya. Dalam hal ini semakin banyak persentase penduduk yang pendapatannya melampaui batas minimum, sehingga penduduk mampu membayar pajak dan retribusi juga semakin meningkat atau tinggi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat perkembangan ekonomi berpengaruh terhadap PAD. Tingkat perkembangan ekonomi diukur berdasarkan berapa besar sumbangan sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier terhadap PDRB.

Berdasarkan rumusan dan landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah Sektor ekonomi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau yang terletak di Jalan Pattimura No. 12 Pekanbaru. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dari Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi tahun 1990 - 2011.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan Penelitian kepustakaan dan Observasi. Analisis data yang digunakan dalam peneliti ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear bergandayang menggunakan program SPSS versi 16.0

Uji Hipotesis

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis ini maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis untuk melihat besarnya pengaruh Sektor Ekonomi(X) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), yang menggunakan cara sebagai berikut:

a. Persamaan Regresi Linear Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk mencari adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sektor ekonomi tersebut terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Riau digunakan model rumusan sebagai berikut:

$$Y = a + b X_1 + b X_2 + b X_3 + b X_4 + b X_5 + b X_6 + b X_7 + b X_8 + b X_9$$

dimana :

Y	: Pendapatan asli daerah	X ₆	: PDRB sektor perdagangan, hotel & resto
X ₁	: Pengetahuan Dewan tentang	X ₇	: PDRB sektor angkutan dan komunikasi
X ₂	: PDRB sektor pertambangan	X ₈	: PDRB sektor keuangan
X ₃	: PDRB sektor industri pengolahan	X ₉	: PDRB sektor jasa-jasa
X ₄	: PDRB sektor listrik, gas, dan air	a	: Konstanta
X ₅	: PDRB sektor bangunan	b	: koefisien regresi

b. Uji t

T-test ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen, yaitu X

(sektor ekonomi) terhadap Y (pendapatan asli daerah). Hasil uji ini pada output SPSS versi 16.0 dapat dilihat pada tabel *coefficients*.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dinyatakan dengan R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara 0 dan 1. Jika nilai adjusted R^2 semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen dan sebaliknya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Sektor Ekonomi Tanpa Migas terhadap PAD Provinsi Riau.

Dari Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian, sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor pengangkutan dan sektor jasa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Namun, pada sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor pertanian berhubungan negatif terhadap PAD. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian lebih didominasi oleh subsektor perkebunan dan kehutanan yang pemungutannya dilakukan oleh pusat. Sehingga semakin banyak kontribusi sektor tersebut semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh pusat dan tidak tercatat dalam PAD. Pemerintah Daerah hanya menerima dalam bentuk DBH.

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Sektor Ekonomi Tanpa Migas.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.398E11	1.375E11		1.744	.107
1. Pertanian	-143784.621	54924.658	-6.566	-2.618	.022
2. Pertambangan dan penggalian	18460.501	9876.610	.250	1.869	.086
3. Industri pengolahan	-113652.170	156265.976	-2.200	-.727	.481
4. Listrik, gas dan air	676934.029	3.667E6	.299	.185	.857
5. Bangunan	587813.096	387656.277	4.999	1.516	.155
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	-373787.388	461360.310	-7.741	-.810	.434
7. Pengangkutan & Komunikasi	958156.537	1.132E6	6.727	.846	.414
8. Keuangan, persewaan & jasa	-514081.440	247901.917	-1.286	-2.074	.060
9. Jasa-jasa	452547.769	486030.480	5.804	.931	.370

a. *Dependent Variable: PAD*

Selanjutnya pada sektor perdagangan juga menunjukkan bahwa sektor perdagangan berhubungan negatif dengan PAD. Hal ini disebabkan karena banyaknya produk dari Riau yang berorientasi kualitas ekspor. Sehingga pendapatan tersebut tidak dicatat kedalam pendapatan asli daerah.

Kemudian, berdasarkan nilai T hitung dengan tingkat signifikansi 5 % diperoleh bahwa sektor pertambangan, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan sektor jasa memiliki nilai T hitung > T tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor pertambangan, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan sektor jasa berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebesar ($df = 22-10$) yaitu 12 dan tingkat signifikan 5% maka nilai T tabel yang diperoleh adalah 0,695. Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, maka dapat disimpulkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{PAD} = 2,398 - 6,566 P + 0,250 Pt - 2,200 In + 0,299 LGS + 4,999 Bg - 7,741 \text{Perd} + 6,727 \text{Peng} - 1,286 \text{Keu} + 5,804 \text{Js}$$

Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Sektor Ekonomi terhadap Pendapatan asli daerah dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Koefisien Determinasi (R²) Sektor ekonomi tanpa Migas

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.937 ^a	.879	.788	6.67430E10	.879	9.665	9	12	.000

a. Predictors: (Constant), 9. Jasa - jasa, 2. Pertambangan dan penggalian, 8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, 4. Listrik, gas dan air, 1. Pertanian, 3. Industri pengolahan, 7. Pengangkutan dan Komunikasi, 5. Bangunan, 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

Dari Tabel 2 dapat dilihat nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,879. Hal ini berarti bahwa sektor ekonomi tanpa migas mempengaruhi PAD sebesar 87,9 % sedangkan 12,1 % dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengaruh Sektor Ekonomi dengan Migas terhadap PAD Provinsi Riau.

Dari Tabel 3 dapat diambil kesimpulan bahwa sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor listrik, sektor perdagangan, sektor pengangkutan dan sektor jasa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pada sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor pertanian berhubungan negatif terhadap PAD. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian lebih didominasi oleh subsektor perkebunan dan kehutanan yang pemungutannya dilakukan oleh pusat. Sehingga semakin banyak kontribusi sektor tersebut semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh pusat dan tidak tercatat dalam PAD. Pemerintah Daerah hanya menerima dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH).

Selanjutnya pada sektor Listrik, gas dan air juga menunjukkan bahwa sektor Listrik, gas dan air berhubungan negatif terhadap PAD. Hal ini disebabkan karena perusahaan listrik, gas dan air minum milik Negara. Sehingga semakin banyak kontribusi sektor tersebut, maka semakin banyak pendapatan yang diperoleh Negara.

Kemudian pada sektor jasa dapat dilihat bahwa sektor jasa berhubungan negatif terhadap PAD. Hal ini bisa terjadi dikarenakan jika memasukkan unsur migas kedalam perhitungan maka sektor pertambangan migas menghasilkan kontribusi yang tinggi, sedangkan sektor lain menjadi kecil kontribusinya terhadap PAD, atau bahkan negatif.

Berdasarkan nilai T hitung dengan tingkat signifikansi 5 % diperoleh bahwa sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pengangkutan memiliki nilai T hitung > T tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pengangkutan berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebesar (df = 22 - 10) yaitu 12 dan tingkat signifikan 5% maka nilai T tabel yang diperoleh adalah 0,695.

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka dapat disimpulkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{PAD} = - 1,833 - 7,801P + 2,216 Pt + 0,905 In - 2,481LGS + 0,095 Bg + 5,697 \text{Perd} + 5,163 \text{Peng} - 0,725 \text{Keu} - 2,528 \text{Js}$$

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Sektor Ekonomi dengan Migas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.833E11	1.809E11		-1.013	.331
1.Pertanian	-170829.769	69051.039	-7.801	-2.474	.029
2.Pertambangan & penggalian	18062.113	17916.702	2.216	1.008	.333
3.Industri Pengolahan	166818.674	194985.759	.905	.856	.409
4.Listrik,gas,air	-5.620E6	2.538E6	-2.481	-2.214	.047
5.Bangunan	11177.261	320030.770	.095	.035	.973
6.Perdagangan ,hotel,restoran	275112.785	324458.983	5.697	.848	.413
7. Pengangkutan & kom	735416.397	811807.209	5.163	.906	.383
8.Keuangan,persewaan & jasa	-289715.604	222320.976	-.725	-1.303	.217
9.Jasa-jasa	-197080.926	449160.812	-2.528	-.439	.669

a. *Dependent Variable: PAD*

Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Sektor Ekonomi terhadap Pendapatan asli daerah dapat dilihat pada Tabel 4. Dari Tabel 4 dapat dilihat nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,910. Hal ini berarti bahwa sektor ekonomi dengan migas mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 91 % sedangkan 9 % dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4
Hasil Koefisien Determinasi (R^2) Sektor ekonomi dengan Migas

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Sig. F Change	
				R Square Change	F Change	df1		df2
1	.954 ^a	.910	5.73648E10	.910	13.556	9	12	.000

a. Predictors: (Constant), 9.Jasa-jasa, 8.Keuangan,persewaan,jasaperusahaan, 3.Industri Pengolahan, 4.Listrik,gas,air, 2.Pertambangan danpenggalian, 1.Pertanian, 5.Bangunan, 7. Pengangkutandankomunikasi, 6.Perdagangan,hotel,restoran

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan,maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terlihat dari hasil penelitian bahwa sektor ekonomi tanpa Migas terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau,dimana semakin tinggi nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor ekonomi, maka akan semakin meningkat pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau. Berdasarkan penelitan ini juga dapat dilihat bahwa sektor pertambangan, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa – jasa merupakan sektor yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau dibandingkan dengan sektor lain.

2. Terlihat dari hasil penelitian bahwa sektor ekonomi dengan Migas terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau. Dimana semakin tinggi nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor ekonomi, maka akan semakin meningkat pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau. Berdasarkan penelitian ini juga dapat dilihat bahwa sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, serta sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau dibandingkan dengan sektor lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, 2004, *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ardy, 2009, Cara perhitungan PDRB
http://prabusetiawan.blogspot.com/2009/05/cara-perhitungan_pdrb.html
diakses tanggal 5 April 2013.
- Badan Pusat Statistik, 1990 – 1995, *Pendapatan Regional Menurut Lapangan Usaha*. Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik, 2007 – 2011, *Pendapatan Regional Menurut Lapangan Usaha*. Pekanbaru.
- Mankiw. G, 2006, *Pengantar Ekonomi Makro*, Salemba empat, Jakarta.
- Mudrajat Kuncoro, 2003, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Sadono Sukirno, 2010, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saragih PJ, 2003, *Desentralisasi fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Ghalia, Indonesia.
- Soekarwo, 2003, *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Airlangga University press, Surabaya.
- Suparmoko, 2002, *Ekonomi Publik untuk Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Syapsan, 2006, *Potensi Retribusi Pelayanan Kesehatan Ketenagakerjaan yang Berangkat keluar Negeri melalui Provinsi Riau*, Jurnal ekonomi FE UR Vol XII No.1 hal 85-101.
- Umar Husein, 2003, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cetakan kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 & 33 tentang Otonomi Daerah 2004-2006*, Citra Umbara, Bandung.
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Wikipedia, 2013, <http://id.wikipedia.org/wiki/Riau#KependudukanSejarah>, diakses tgl 19 Mei 2013.